

Korban dari Pengguna

Melawan Perdagangan Manusia: Dari Keberanian Moral Menuju Reformasi Struktural



Bernardus Agus Rukiyanto

Dosen Teologi Prodi Pendidikan Keagamaan
Katolik, Universitas Sanata Dharma. Lulusan S...

 Ikuti kumpulan di Google



2 Maret 2025 1:00 WIB · waktu baca 5 menit



Tulisan dari Bernardus Agus Rukiyanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumpulan



Ilustrasi perdagangan manusia. Foto: Shutterstock

Belum lama ini di Maumere, pada 21 Januari 2026, Fransiska Imakulata, yang lebih dikenal sebagai Suster Ika SSpS (Kongregasi Servae Spiritus Sancti) berhasil menyelamatkan dua belas perempuan asal Jawa Barat yang diduga terjerat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Peristiwa ini bukan sekadar kisah heroisme Sr. Ika, melainkan cermin yang memantulkan wajah rapuh sistem sosial kita, yaitu adanya kemiskinan struktural, lemahnya pengawasan perekrutan tenaga kerja, dan rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat rentan. Lebih dari itu, peristiwa ini menghadirkan pertanyaan mendasar: sejauh mana bangsa kita sungguh menghormati martabat manusia?

Martabat yang Direduksi Menjadi Komoditas

Perdagangan orang selalu berawal dari janji: pekerjaan yang mudah, gaji tinggi, dan masa depan yang cerah. Namun janji itu berubah menjadi jerat ketika korban kehilangan kebebasan bergerak, dipaksa bekerja di luar kesepakatan, bahkan mengalami intimidasi dan kekerasan. Di titik inilah manusia direduksi menjadi alat.

Filsuf Immanuel Kant dalam *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (1785) menegaskan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, tidak pernah semata-mata sebagai sarana. TPPO secara nyata melanggar prinsip ini. Korban diperlakukan sebagai komoditas ekonomi; nilai dirinya diukur dari keuntungan yang bisa didapatkan.

Namun persoalan ini bukan hanya masalah moral individu pelaku, melainkan persoalan sistemik. Ketika peluang untuk bekerja secara aman terbatas dan terjadi ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, orang-orang yang lemah menjadi sasaran kelompok sindikat. Dalam konteks ini, kita melihat apa yang disebut “kekerasan struktural” oleh Johan Galtung (1969): struktur sosial yang secara tidak langsung melukai individu karena tidak mampu menyediakan kesejahteraan dan perlindungan serta keadilan.

Kemiskinan, Kerentanan, dan Ilusi Mobilitas

Indonesia masih menghadapi ketidakadilan ekonomi antarwilayah. Banyak perempuan muda dari daerah dengan kesempatan kerja yang terbatas tergoda terhadap tawaran kerja lintas daerah yang menjanjikan dengan iming-iming gaji tinggi dan berbagai macam fasilitas. Di sinilah pemikiran Amartya Sen dalam *Development as Freedom* (1999) relevan untuk kita pertimbangkan. Sen menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kebebasan substantif: kebebasan untuk memilih pekerjaan yang layak, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari eksploitasi.

Jika seseorang “memilih” pekerjaan karena tidak ada alternatif lain yang layak, apakah itu benar-benar pilihan bebas? Kebebasan semu inilah yang sering menjadi pintu masuk TPPO. Tanpa akses pendidikan, informasi, dan perlindungan hukum, individu yang rentan terperangkap dalam pilihan yang secara formal tampak sukarela tetapi secara substantif terpaksa.

Kehilangan Ruang Publik dan Suara



Ilustrasi perdagangan manusia. Foto: Shutterstock

Korban perdagangan orang kerap diisolasi dari ruang publik. Mereka kehilangan suara, jaringan sosial, dan perlindungan komunitas. Filsuf politik Hannah Arendt dalam *The Human Condition* (1958) menjelaskan bahwa eksistensi manusia menjadi utuh ketika ia dapat tampil di ruang publik, bebas berbicara dan bertindak bersama orang lain. Ketika korban disembunyikan, dikurung, atau diintimidasi, mereka bukan hanya kehilangan kebebasan fisik, tetapi juga kehilangan keberadaan politiknya sebagai warga.

Tindakan penyelamatan oleh Suster Ika dan jejaring relawan di Flores pada hakikatnya adalah pemulihan ruang publik itu. Korban kembali terlihat, kembali memiliki suara, kembali diakui sebagai subjek hukum dan sosial. Keberanian moral individu membuka jalan bagi pemulihan martabat kolektif.

Dimensi Etika dan Spiritualitas

Peristiwa ini juga mengandung dimensi spiritual yang kuat. Dalam tradisi keagamaan, manusia dipahami sebagai makhluk bermartabat karena diciptakan menurut citra ilahi. Ketika manusia diperdagangkan, yang tercabik bukan hanya hak hukum, tetapi juga nilai sakral kehidupan itu sendiri.

Dalam ensiklik *Fratelli Tutti* (2020), Paus Fransiskus menyebut perdagangan manusia sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” yang lahir dari budaya pembuangan. Manusia diperlakukan sebagai barang sekali pakai. Kritik ini relevan dalam konteks kita: ekonomi yang hanya mengejar keuntungan tanpa etika akan selalu menghasilkan korban.

Namun spiritualitas tidak boleh berhenti pada empati. Spiritualitas harus menjadi energi transformasi sosial. Keberanian Suster Ika menunjukkan bahwa iman yang otentik tidak tinggal dalam retorika, tetapi bergerak membela yang rentan.

Reformasi Struktural: Apa yang Harus Dilakukan?

Pertama, penguatan sistem perekrutan tenaga kerja lintas daerah. Negara perlu memastikan setiap proses perekrutan tercatat, terverifikasi, dan transparan. Pengawasan tidak cukup bersifat administratif; harus ada inspeksi lapangan dan sanksi tegas bagi pelanggar.

Kedua, literasi hukum dan digital di tingkat akar rumput. Banyak korban tidak memahami hak-haknya atau tidak tahu saluran pengaduan. Pendidikan publik tentang modus TPPO, terutama melalui sekolah, gereja, masjid, dan komunitas lokal, menjadi krusial. Di sini relevan pemikiran Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970). Pendidikan harus membangkitkan kesadaran kritis (*conscientization*), agar masyarakat mampu membaca realitas dan menolak manipulasi.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi perempuan. Akses pelatihan kerja, kredit mikro, dan kewirausahaan sosial dapat mengurangi ketergantungan pada tawaran kerja berisiko tinggi. Pembangunan ekonomi harus diarahkan pada penciptaan pekerjaan bermartabat, bukan sekadar angka pertumbuhan.

Keempat, rehabilitasi dan reintegrasi korban. Penanganan tidak berhenti pada penyelamatan. Korban membutuhkan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial agar tidak kembali terjerat. Tanpa dukungan jangka panjang, trauma dan stigma dapat menjadi lingkaran baru kerentanan.

Dari Simpati Menuju Komitmen Nasional

Kisah di Maumere menyentuh hati publik. Namun simpati mudah memudar jika tidak diikuti dengan komitmen struktural. Kita membutuhkan sinergi antara negara, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil. Perdagangan manusia adalah kejahatan lintas wilayah; penanganannya pun harus lintas sektor.

Peristiwa ini mengingatkan bahwa di tengah sistem yang rapuh, masih ada individu yang berani berdiri. Namun keberanian personal tidak boleh menjadi substitusi bagi sistem yang kuat. Sebaliknya, keberanian itu harus menjadi katalis perubahan.

Bangsa yang beradab diukur bukan dari gedung tinggi atau pun pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari caranya melindungi warga yang paling lemah. Jika martabat manusia sungguh menjadi fondasi kehidupan berbangsa, maka setiap kebijakan ekonomi, pendidikan, dan hukum harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana: apakah kebijakan itu menegaskan kebebasan dan keamanan mereka yang paling rentan?

Kisah penyelamatan dua belas perempuan itu adalah tanda harapan. Tetapi harapan sejati hanya akan lahir ketika keberanian moral individu menjelma menjadi reformasi struktural yang konsisten. Tanpa itu, kita akan terus membaca kisah serupa—dengan nama dan tempat berbeda.

Sudah saatnya kita melampaui simpati. Sudah saatnya menjadikan perlindungan martabat manusia sebagai agenda nasional yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

TPPO

Perdagangan Orang



Tim Editor ▾